

**PARADIGMA *GOOD GOVERNANCE* DALAM ADMINISTRASI PUBLIK  
MEMFASILITASI PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN (TPB)**

**Angga Natalia**  
UIN Raden Intan Lampung  
[angganatalia@radenintan.ac.id](mailto:angganatalia@radenintan.ac.id)

Diterima: 24 Mei 2022

Disetujui: 26 Mei 2022

Dipublikasikan: 30 Mei 2022

**Abstrak**

Administrasi Publik telah mengalami beberapa perubahan paradigma yaitu Old Public Administration (OPA), New Public Administrations (NPA), New Public Management (NPM), dan New Public Service (NPS) dan paradigma yang terakhir yaitu *good governance* yang mengembangkan prinsip-prinsip partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsif, orientasi konsensus, keadilan efektivitas dan efisiensi akuntabilitas dan visi strategis. Prinsip-prinsip tersebut dinilai sangat tepat untuk dijadikan panduan bagi penentuan prinsip kemitraan tujuan pembangunan berkelanjutan. Beberapa Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) merupakan agenda bersama secara global. Dengan adanya paradigma *good Governance* dalam Administrasi Publik dapat memfasilitasi TPB agar tata kelola urusan publik mampu menetapkan ketentuan dan langkah-langkah dalam pencapaian *public goods* dan *public service* dalam satu kesatuan pikiran dan tindakan sesuai dengan prinsipnya *no one left behind*.

**Keywords:** *Good Governance*, Administrasi Publik, TPB

## PENDAHULUAN

Setiap negara melakukan pembangunan sebagai proses menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan hal-hal penting dalam setiap prosesnya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda global hasil kesepakatan seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2015. Sebagai agenda bersama, baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta dan aktor pembangunan punya tanggung jawab yang sama dalam pelaksanaan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pemerintah dalam hal ini merupakan aktor utama karena memiliki tanggung jawab dalam pengadministrasian publik TPB yang mencakup penyediaan regulasi, penyediaan anggaran, sumber daya manusia dan pendukung lainnya. Bouckaert<sup>1</sup> memberi penegasan bahwa formulasi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) akan berbeda-beda pada tiap aktor pembangunan, namun “*public administration is everywhere in the SDGs and prominence of public administration in the SDGs is a positive development*”.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menimbulkan beragam reaksi masyarakat. Ada kelompok yang optimis, ada kelompok yang pesimis, dan ada kelompok yang tidak peduli. Tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang menekankan pada pentingnya menciptakan keseimbangan di antara dimensi Pembangunan, seperti ekonomi sosial dan lingkungan. Tujuan pembangunan berkelanjutan mempunyai dua konsep kunci, yaitu kebutuhan, yakni kesadaran akan adanya kebutuhan hidup masyarakat khususnya masyarakat miskin, dan keterbatasan, yaitu adanya keterbatasan dari teknologi dan organisasi sosial yang berkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dua konsep ini harus dikelola secara cerdas agar kebutuhan

---

<sup>1</sup> Bouckaert dan dkk, dalam Djonet Santoso, *Administrasi Publik* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2019), hal. viii.

masyarakat di satu sisi dapat dipenuhi sekaligus Berusaha tetap menjaga kelestarian alam yang semakin terbatas di sisi lain.

Administrasi Publik berada di wilayah yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Artinya, praktek administrasi publik yang efektif mempunyai peranan penting dalam memfasilitasi proses formulasi kebijakan politik, mengimplementasikan kebijakan publik berkaitan erat dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan substansi kebijakan publik dalam proses pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian praktek administrasi publik yang efektif menjadi sangat vital titik dengan panduan partisipasi seluruh Mitra SDGs (*Sustainable Development Goals*) praktek Administrasi Publik harus memfasilitasi praktek-praktek inklusif, setara dan berkeadilan yang efektif dan proses-proses formulasi implementasi, serta monitoring dan evaluasi usaha usaha pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di manapun, Administrasi Publik akan memainkan sejumlah peran penting di antaranya dalam menyelenggarakan pelayanan publik guna mewujudkan salah satu tujuan utama dibentuknya negara yakni kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Pergeseran paradigma Administrasi Publik ke arah *good governance* telah membawa implikasi terhadap penyelenggaraan peran Administrasi Publik khususnya terkait dengan pendekatan yang digunakan dalam pembuatan dan pelaksanaan strategi baik pengelolaan organisasi secara internal maupun eksternal.<sup>2</sup> Implikasi yang demikian tentu saja pada akhirnya akan menentukan corak dan ragam dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara tak terkecuali pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

## A. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.

---

<sup>2</sup> Teguh Kurniawan, "Pergeseran Paradigma Administrasi Publik," *Jurnal Ilmu Adm. Negara*, Vol. 7 (2007): hal. 1-2.

Menurut Tanzeh, suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>3</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Istilah dalam penelitian, peneliti tidak mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian. Dalam kegiatan penelitian ini peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas, seperti apa adanya.<sup>4</sup> Sementara desain yang digunakan dalam tulisan ini adalah desain *library studies*, dimana penulis melakukan penelusuran terhadap literatur kemudian melakukan penelaahan.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Perkembangan Administrasi Publik**

Administrasi publik secara substantif dijelaskan sebagai praktek penggunaan teori dan proses manajerial, politik dan hukum untuk memenuhi mandat suprastruktur yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif guna penyediaan fungsi pengaturan dan layanan bagi masyarakat secara keseluruhan atau untuk beberapa segmennya. Mengambil argumentasi Montes dalam santoso<sup>5</sup>, Prakteknya politik administrasi publik memiliki orientasi dan kewenangan pada perumusan kebijakan publik pada legislatif, praktek managerial berorientasi pada implementasi kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif dan praktek legal yang berorientasi pada evaluasi dan kontrol kebijakan yang dilaksanakan oleh yudikatif.

Perkembangan administrasi publik dapat diuraikan dalam empat perkembangan paradigma yaitu, *Old Public Administration* (OPA), *New Public Administrations* (NPA), *New Public Management* (NPM), dan *New*

---

<sup>3</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 5.

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakteik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 3.

<sup>5</sup> Djonet Santoso, *Administrasi Publik* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2019), hal. 128.  
Jurnal TAPIS Vol. 18 No. 1 Januari—Juni 2022

*Public Service* (NPS).<sup>6</sup> Masing-masing paradigma tersebut memiliki ciri khas masing-masing. Pertama, ciri khas yang menonjol dari OPA adalah pada penguatan karakteristiknya terpisah dari politik dan condong pada manajemen ilmiah dan kelemahannya adalah administrasi publik tidak banyak berperan dalam perumusan kebijakan publik. Kedua, paradigma NPA, kinerja administrasi publik tidak cukup hanya dinilai dari pencapaian nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas tetapi juga pada nilai *social equity* atau keadilan sosial. Ketiga, NPA memiliki karakteristik yaitu lebih terfokus pada hasil, perubahan birokrasi yang fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, adanya tujuan yang jelas, pemerintah lebih bersifat mengarahkan dan memfasilitasi daripada melaksanakan pelayanan publik secara langsung, serta cenderung mengurangi fungsi-fungsi pemerintah melalui privatisasi. Keempat, NPS mengkritisi prinsip yang dikembangkan NPM, bahwa pemerintah tidak boleh dijalankan dengan tata cara bisnis melainkan harus dengan tata cara demokrasi. NPS memiliki beberapa prinsip yaitu, melayani warga negara bukan customer, kepentingan publik sebagai pondasi, nilai warga negara lebih tinggi daripada nilai customer, bertindak strategis dan demokratis, akuntabilitas, konsen melayani dengan hati.<sup>7</sup>

Rondinelli menjelaskan perkembangan terakhir administrasi publik dalam paradigma kelima yaitu pemerintahan yang baik atau *good governance* mengembangkan pemikiran-pemikiran partisipasi aturan hukum, transparansi, responsif, orientasi konsensus, keadilan efektivitas dan efisiensi akuntabilitas dan visi strategis.<sup>8</sup> Titik Perkembangan Paradigma ini sesungguhnya dipengaruhi oleh perkembangan teori-teori

---

<sup>6</sup> William Djani, *Spirit Reformasi Birokrasi Publik (Menuju one stop services system)* (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2020).

<sup>7</sup> H. George Frederickson, *The Public Administration Theory Primer*, 2 ed. (Colorado: Westpress, 2020).

<sup>8</sup> Denis A. Rondinelli, "Governments serving people: The Changing roles of publik administration in demokratik governance" (Public Administration and Democratic Governance: Government serving Citizens, 7th Global Forum on Reinventing Government: Building Trust in Government, Vienna, Austria, 26 Juni 2007), 1–28.

demokrasi yang mendorong munculnya teori-teori pemberdayaan, partisipasi dan desentralisasi.

## 2. Konsep Good Governance

Pemahaman tentang pemerintah atau *government* dahulu sangat identik dengan kekuasaan, penguasaan, kewenangan, dominasi, pemaksaan, pemusatan, dan sebagainya pemerintah yang diwakili oleh praktek Administrasi Publik adalah segala-galanya dan Mahakuasa yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Saat ini para ilmuwan politik mempertanyakan dan memikirkan kembali dari peran pemerintah pandangan baru terletak pada isu-isu Abadi tentang bagaimana menciptakan pemerintah yang terpilih dan bertanggungjawab untuk memainkan peran fasilitasi dalam masyarakat. dari sinilah muncul istilah *governance* atau pemerintahan yang lebih menekankan pada interaksi antara negara dan masyarakat sipil. *Governance* tidak sama dengan *government* dalam arti sebagai lembaga titik *governance* adalah proses ke pemerintahan dalam arti yang luas. *Governance* sebagai sebuah konsep yang berada dalam konteks hubungan antara sistem politik dengan lingkungannya dan mungkin melengkapi sebuah proyek yang membuat ilmu politik mempunyai relevansi dengan kebijakan publik titik berpikir mengenai *governance*, berpikir mengenai bagaimana semua pihak mencapai tujuan-tujuan bersama dan saling bekerja sama. Perspektif baru tentang pemerintah, yaitu perubahan peran pemerintah menjadi lebih partisipatif dan kemampuannya mewujudkan kepentingan bersama. Secara empirik dimensi *governance* mencakup tiga elemen yaitu, pengaruh warga negara, resiprositas sosial, kepemimpinan yang responsif dan bertanggung jawab.

Penpeyelenggaraan pemerintahan bukan hanya bergantung pada negara yang mampu memerintah dan sektor swasta yang mampu menyediakan pekerjaan dan penghasilan, akan tetapi juga bergantung pada masyarakat sipil yang memfasilitasi interaksi sosial dan politik, serta memobilisasi berbagai kelompok dalam masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas sosial, ekonomi dan politik. Perspektif baru tentang pemerintah,

yaitu petan pemerintah menjadi lebih partisipatif dan kemampuannya mewujudkan kepentingan bersama, merupakan jantung *governance*.

*Governance* dalam konteks administrasi publik adalah merupakan proses perumusan dan implementasi untuk mencapai tujuan-tujuan publik yang dilakukan oleh aktor: pluralitas organisasi, dengan sifat hubungan yang lebih luwes dalam tataran vertikal dan horisontal, disemangati oleh nilai-nilai kepublikan antara lain keabsahan, responsif dan kreatif. Pada hakikatnya, penyelenggaraan pemerintahan ditujukan kepada optimalnya fungsi pelayanan publik melalui praktek administrasi yang efektif. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya terbatas pada penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dikembangkan dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang tidak hanya melibatkan pemerintah atau negara semata, tetapi juga harus bisa ditunjukkan dengan praktek administrasi publik yang baik.

### 3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan hasil kesepakatan 193 negara anggota PBB yang melibatkan partisipasi masyarakat sipil serta berbagai pemangku kepentingan. Sejak awal TPB disusun melalui proses partisipatoris semua kalangan baik pemerintah, dunia usaha dan filantropi, masyarakat sipil serta akademis. Pondasi yang digunakan juga berbasis *no one left behind* atau *leave no one behind* yang berarti tidak boleh satu orangpun tertinggal baik dalam partisipasi maupun pencapaian sasaran. Bahagijo<sup>9</sup> mencatat bahwa 27 anggota *high level panel* (HLP) bukan hanya terdiri dari para ahli dan kepala pemerintahan saja, namun wakil kelompok pengusaha dan masyarakat sipil.

Santoso menjelaskan terdapat lima kesepakatan yang dipergunakan sebagai landasan pemikiran pencapaian TPB yaitu:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sugeng Bahagijo, “Janji Sustainable Development Goals: Kebebasan, Kesetaraan, dan Ekologi,” Prisma, Vol. 35, no. 2 (2016).

<sup>10</sup> Djonet Santoso, *Administrasi Publik*, 22–24.  
Jurnal TAPIS Vol. 18 No. 1 Januari—Juni 2022

1. *People* atau penduduk, argumentasi yang dikembangkan adalah bahwa pemenuhan hak asasi manusia dan hak kesetaraan antar penduduk dunia harus menjadi agenda utama pembangunan.
2. *Planet* atau bumi, semua negara bertekad untuk melindungi bumi dari degradasi atau kerusakan. Menjadikan bumi sebagai tempat hidup yang nyaman dengan lingkungan sehat bagi seluruh umat manusia hari ini dan esok harus menjadi komitmen seluruh bangsa di dunia.
3. *Prosperity* atau kemakmuran dan kesejahteraan, pembangunan wajib menjaga harmoni dengan alam dan tidak merusaknya, semua negara bertekad untuk memastikan kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi harus selaras dengan alam.
4. *Peace* atau perdamaian, perlu adanya semangat menumbuhkan masyarakat yang damai, adil dan inklusif yang bebas dari rasa takut dan kekerasan.
5. *Partnership* atau kemitraan, karena kemitraan merupakan wujud nyata dari komitmen kesetaraan, tidak eksklusif, tidak bias gender, serta saling melengkapi dan menyempurnakan baik kemitraan tingkat lokal sampai ke tingkat global.

Pelaksanaan TPB ini memang memunculkan dua kelompok yang saling bertolak belakang, Kelompok pesimis menganggap tujuan pembangunan berkelanjutan adalah sebuah agenda internasional bukan agenda pembangunan Indonesia yang menganggap skema pembangunan terkesan terlalu ambisius. Kelompok kedua disebut sebagai kelompok optimis yang meyakini bahwa TPB merupakan solusi terbaik bagi penyelesaian masalah kemiskinan dan keberlanjutan SDA di dunia. Kekhawatiran akan kemampuan SDM dalam mencapai TPB harus diubah menjadi tantangan yang dapat diselesaikan bersama. Prinsip TPB dengan pendekatan inklusif, adil dan setara, dan *no one left behind*, telah memberikan penjelasan bagaimana seharusnya proses pembangunan berkelanjutan dilaksanakan. Namun Bahagijo<sup>11</sup> menegaskan, jika ada yang mengatakan tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan agenda.

---

<sup>11</sup> Sugeng Bahagijo, "Janji Sustainable Development Goals: Kebebasan, Kesetaraan, dan Ekologi." Jurnal TAPIS Vol. 18 No. 1 Januari—Juni 2022



internasional dan bukan agenda Indonesia, ini dianggap keliru. Menurutnya hal itu akan mengabaikan fakta bahwa Indonesia memiliki andil besar dalam kegiatan di PBB, dan sejumlah OMS di Indonesia telah aktif dalam perundingan TPB. Skema TPB membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas pemikiran komprehensif dan rasional. Bagaimana mungkin target TPB akan tercapai jika banyak studi menyebutkan bahwa kualitas pemikiran sumber daya manusia di berbagai negara miskin dan berkembang adalah sering melihat suatu masalah dari satu sisi saja, informasi yang terbatas, dan seringkali mengedepankan emosi daripada rasio.

#### **4. Integrasi Paradigma Good Governance dalam Administrasi Publik dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Praktek Administrasi Publik harus berubah mengikuti dinamika tuntutan pembangunan dan pelayanan publik. jika praktek administrasi publik yang lemah ditengarai sebagai faktor kunci penyebab kinerja pencapaian MDGS yang kurang efektif maka praktik tersebut harus diubah, dioptimalkan, dan ditingkatkan kualitasnya. Tujuan pembangunan berkelanjutan membutuhkan administrasi publik yang efektif untuk dapat mencapai tujuan target dan indikator nya sampai dengan tahun 2030. perubahan paradigma praktek Administrasi Publik harus dimaknai sebagai keinginan yang sangat kuat para administrator pemerintah di semua tingkatan untuk lebih mendekat kepada realitas masalah dan tuntutan publik untuk penyelesaiannya. Perubahan tersebut harus mampu mengukuhkan eksistensi Administrasi Publik dalam mendukung kehadiran negara pelayanan publik dan dalam banyak penyelesaian masalah pembangunan. Melalui diskusi tentang paradigma *good governance* atau pemerintah yang baik dalam administrasi publik akan memberikan arah yang dibutuhkan bagi praktek Administrasi Publik memfasilitasi berbagai usaha seluruh Mitra dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara efektif. Dalam perspektif administrasi publik, kurang efektifnya pembangunan di negara-

negara berkembang justru disebabkan oleh ketidakmampuan administrasi publik beradaptasi dengan berbagai perubahan paradigma progresif.

Satu prinsip yang sangat kuat dari tujuan pembangunan berkelanjutan adalah inklusivitas dan *no one left behind*. Inklusif berarti membuka ruang dialog bagi banyak perbedaan sudut pandang dan pemikiran untuk menyelesaikan masalah. Semangat *no one left behind* diartikan memberikan manfaat bagi semua tanpa terkecuali. Untuk mewujudkan TPB memerlukan skema kerja sama untuk pencapaiannya. Untuk mencapai agenda 2030 para perancang TPB sadar bahwa itu bukan hal yang mudah. Oleh sebab itu harus dipastikan bahwa pilihan prinsip kemitraan TPB akan secara signifikan menentukan ektivitas pencapaiannya. Prinsip-prinsip *good governance* atau pemerintahan yang baik dinilai sangat tepat dipilih untuk dijadikan sebagai panduan penentuan prinsip kemitraan TPB yang di perinci pada tabel di bawa ini.

Tabel 1

Prinsip-prinsip *good governance* dalam prinsip prinsip kemitraan TPB<sup>12</sup>

<b>Prinsip-prinsip <i>good governance</i></b>	<b>Prinsip-prinsip TPB</b>
1. <i>Transparency</i> , kesiapan semua pihak untuk terbuka mengenai segala hal	1. <i>Trust building</i> , membangun kepercayaan dilakukan dengan saling terbuka dan percaya
2. <i>Equality</i> , tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah	2. <i>Equal partnership</i> , kemitraan yang setara, memiliki hak dan kewajiban yang sama
3. <i>Participation</i> , partisipasi menjadi bagian dari kerja sama	3. <i>Participation</i> , keikutsertaan atau menjadi bagian
4. <i>Accountable</i> , bertanggung jawab	4. <i>Accountable</i> , dapat dipertanggungjawabkan
5. <i>Mutual benefits</i> , demi keuntungan bersama	5. <i>Mutual benefits</i> , keuntungan bersama.
6. <i>Strategic vision</i> , memiliki visis strategis	
7. <i>Law enforcement</i> , adanya penegakan hukum	
8. <i>Responsiveness</i> , cepat tanggap dalam segala persoalan	

<sup>12</sup> Djonet Santoso, *Administrasi Publik*, hal. 28.  
 Jurnal TAPIS Vol. 18 No. 1 Januari—Juni 2022

9. <i>Effective and efficient</i> , efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan	
---	--

Untuk prinsip lainnya dalam tujuan pembangunan berkelanjutan tidak disebutkan secara spesifik tetapi ditemukan dalam berbagai narasi berikut ini:

1. Visi strateis TPB adalah meningkatkan harkat dan martabat manusia dan pada saat yang bersamaan terjaganya lingkungan dan ekosistem yang berkelanjutan bagi kehidupan seluruh umat manusia.
2. Penegakan hukum berarti juga memberikan dukungan kebijakan yang kondusif untuk pencapaian prinsip adil dan setara
3. Responsif, tanggapan cepat dan positif terhadap berbagai persoalan TPB yang ditegaskan dalam pesan monitoring dan evaluasi yang efektif
4. Efektif dan efisien dalam pencapaian TPB dijlaskan hampir disetiap prinsip, khususnya prinsip *zero goals*, dan *no one left behind*.

### C. KESIMPULAN

Administrasi Publik dapat selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), hal yang perlu dilakukan yaitu: *pertama*, administrasi publik atas TPB harus ditempatkan sebagai pilar yang berdiri sendiri dalam pencapaian pembangunan. Ini artinya, tata kelola administrasi publik yang baik harus menjadi agenda dalam implementasi TPB. *Kedua*, perlu adanya perubahan corak administrasi publik yang perlu menerapkan pendekatan *good governance* agar mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan yang semakin kompleks dan berstandar tinggi.

Secara sederhana, administrasi publik dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) harus terarah agar tata kelola urusan publik mampu menetapkan langkah-langkah dalam pencapaian *public goods* dan *public service*. Untuk itu perlu adanya sinergisitas antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta agar tidak ada yang tertinggal dalam TPB seperti prinsipnya *no one left behind*. Karena dengan adanya sinergisitas tersebut akan menjadi sumber utama dalam semua bidang dan tahapan pembangunan.

### Daftar Pustaka

- Ahmad Tanzeh. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Bouckaert dan dkk. *dalam Djonet Santoso, Administrasi Publik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2019.
- Denis A. Rondinelli. “Governments serving people: The Changing roles of publik administration in demokratik governance.” Dipresentasikan pada Public Administration and Democratic Governance: Government serving Citizens, 7th Global Forum on Reinventing Government: Building Trust in Government, Vienna, Austria, 26 Juni 2007.
- Djonet Santoso. *Administrasi Publik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2019.
- H. George Frederickson. *The Public Administration Theory Primer*. 2 ed. Colorado: Westpress, 2020.
- Sugeng Bahagijo. “Janji Sustainable Development Goals: Kebebasan, Kesenjangan, dan Ekologi,” *Prisma*, Vol. 35, no. 2 (2016).
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakteik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Teguh Kurniawan. “Pergeseran Paradigma Administrasi Publik,” *Jurnal Ilmu Adm. Negara*, Vol. 7 (2007).
- William Djani. *Spirit Reformasi Birokrasi Publik (Menuju one stop services system)*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020.